Keterlibatan Stakeholder dalam Perencanaan Pembiayaan untuk Meningkatkan Mutu Kualitas Pendidikan

Rohayanah;

Administrasi Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang
rohayanah@staff.unsika.ac.id

Maman Suryaman

Administrasi Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang
suryaman@fkip.unsika.ac.id

Abstract

The quality of education is determined by the effectiveness of financial planning and management. In this context, the involvement of various parties or stakeholders is an important aspect that cannot be ignored. However, in practice, stakeholder involvement is still often a formality and has not touched the substance of planning. This research uses a descriptive qualitative approach through a literature study to examine the extent to which the role of stakeholders in education financing planning contributes to improving the quality of education. The results of the study show that there is a gap between the potential and realization of stakeholder participation, which is caused by a lack of capacity, the absence of standard operational standards and the lack of open communication space. In fact, meaningful involvement can strengthen social control, improve program effectiveness and promote the relevance of education to local needs. This requires a collaborative approach that involves all parties from the planning stage to budget evaluation. This study recommends strengthening capacity and developing participatory models as strategic steps in building financing governance that supports sustainable improvements in the quality of education.

Keywords: *stakeholders; education financing; education quality.*

Abstrak

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh efektivitas dalam perencanaan dan pengelolaan pembiayaan. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai pihak atau stakeholder menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Namun, pada praktiknya, pelibatan stakeholder masih sering bersifat formalitas dan belum menyentuh substansi perencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur untuk menelaah sejauh mana peran stakeholder dalam perencanaan pembiayaan pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi partisipasi stakeholder, yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, tidak adanya standar operasional baku, dan minimnya ruang komunikasi yang terbuka. Padahal, pelibatan yang bermakna dapat memperkuat kontrol sosial, meningkatkan efektivitas program, dan mendorong relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal. Untuk itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak sejak tahap perencanaan hingga evaluasi anggaran. Kajian ini merekomendasikan penguatan kapasitas dan pengembangan model partisipatif sebagai langkah strategis dalam membangun tata kelola pembiayaan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kata kunci: *stakeholder; pembiayaan pendidikan; mutu pendidikan.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, perencanaan pembiayaan menjadi salah satu elemen strategis yang tidak bisa diabaikan¹. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut ketersediaan dana, tetapi juga mencakup bagaimana dana tersebut direncanakan, dialokasikan, dan dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Di era desentralisasi pendidikan, sekolah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya, termasuk anggaran. Namun, kewenangan ini juga membawa tanggung jawab yang besar dalam menjaga transparansi dan efektivitas penggunaan dana. Tanpa keterlibatan stakeholder yang aktif, pelaksanaan desentralisasi hanya menjadi kebijakan formal tanpa substansi partisipatif.

Partisipasi stakeholder menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan sekolah. Stakeholder pendidikan tidak terbatas pada pemerintah sebagai penyedia anggaran, tetapi juga melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan bahkan peserta didik. Dalam paradigma manajemen berbasis sekolah (MBS), keterlibatan stakeholder bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah pendekatan strategis untuk membangun rasa memiliki, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal².

Keterlibatan stakeholder juga memiliki implikasi psikologis dan sosial yang positif. Ketika orang tua, guru, dan masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih

¹ Moh Nasir et al., "Strategi Pemberdayaan Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Manajemen Pendidikan," *Journal Of International Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2023): 799–816, <https://doi.org/10.62504/mbznza39>.

² Muhammad Ridwan Setiawan, Adjat Sudrajat, and Ida Tedjawiani, "Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah (Studi Deskriptif Tentang Peran Kepala Sekolah Dalam MBS Pada SMPN 3 Dan SMPN 4 Malangbong)," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2022): 1335–46, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.553>.

besar terhadap keberhasilan program-program pendidikan³. Hal ini akan memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Sebaliknya, ketika pelibatan tidak terjadi, muncul ketidakpuasan, ketidakpercayaan, bahkan resistensi terhadap kebijakan sekolah⁴.

Dari sisi regulasi, keterlibatan stakeholder telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud terkait pengelolaan dana BOS. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembiayaan pendidikan masih belum berjalan secara optimal. Akibatnya, alokasi dana pendidikan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, sehingga program-program peningkatan mutu tidak dapat berjalan secara maksimal. Minimnya pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan juga berdampak pada lemahnya pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan⁵.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah dapat berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan program dan peningkatan mutu pendidikan⁶. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat aspek partisipatif, tetapi juga menjadi sarana dialog dan komunikasi antar berbagai unsur yang berkepentingan terhadap kemajuan sekolah. Menurut⁷, keterlibatan aktif stakeholder dalam perencanaan pembiayaan

³ Risa Arisanti and Sofyan Sauri, "Analisis Kebijakan Program Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Partisipasi Orang Tua Dan Masyarakat," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 1 (2022): 103–24, <https://doi.org/10.47467/mk.v22i1.2061>.

⁴ Jaenudin, "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah : Perspektif Pendidikan," *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 939–44, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.937>.

⁵ Nurhayati et al., "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bnatuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Kolaka Timur," *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* 8, no. 22 (2023): 38–51, <https://doi.org/10.33772/jpep.v8i1.254>.

⁶ Tuzahra, Wahyuni, and Maison, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung)," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 5 (2022): 2313–30, <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i5.3667>.

⁷ Hudodo et al., (2022)

pendidikan memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di satuan pendidikan.

Komite sekolah, sebagai representasi masyarakat dan orang tua, dapat menjadi mitra penting dalam menyusun rencana anggaran tahunan sekolah. Penelitian oleh⁸ menunjukkan bahwa komite sekolah berperan sebagai mediator antara lembaga pendidikan dan masyarakat, serta memberikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Guru sebagai pelaksana teknis pembelajaran juga memiliki peran strategis dalam mengusulkan kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan konteks kurikulum dan karakteristik peserta didik. Begitu pula kepala sekolah sebagai manajer pendidikan, dituntut mampu menyinergikan seluruh aspirasi tersebut ke dalam rencana yang komprehensif dan realistis. Program seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai komponen mutu pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran, dan penguatan kegiatan kesiswaan⁹.

Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mendorong keterlibatan stakeholder, seperti Permendikbud tentang pengelolaan dana BOS, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kapasitas stakeholder dalam memahami mekanisme pembiayaan, kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah, serta adanya budaya birokratis yang belum memberi ruang partisipasi aktif. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih edukatif dan kolaboratif agar stakeholder dapat terlibat secara bermakna dalam seluruh siklus perencanaan keuangan pendidikan¹⁰. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan, tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Serta, penelitian ini diharapkan mampu

⁸ Amanati et al., (2024)

⁹ Suharyanto H. Soro et al., "Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru (Studi Kasus Penggunaan Anggaran Di SMP Negeri 36 Kota Bandung)," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2024): 2441–48, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1315>.

¹⁰ Hudodo, Ansar, and Fory Armin Naway, "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato."

memberikan gambaran nyata di lapangan serta memberikan masukan untuk perbaikan tata kelola pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai teknik utamanya. Studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep, peran, serta dinamika keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembiayaan pendidikan, berdasarkan referensi teori, hasil penelitian sebelumnya, dan regulasi yang relevan¹¹. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel, seperti jurnal nasional dan internasional, artikel penelitian, dan dokumen regulasi yang terkait dengan pembiayaan pendidikan dan partisipasi stakeholder dalam manajemen sekolah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur menggunakan kata kunci seperti stakeholder pendidikan, perencanaan pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat dalam sekolah, dan mutu pendidikan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapannya yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari masing-masing literatur yang relevan, mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian, dan menyusun sintesis temuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembiayaan pendidikan.

Temuan Penelitian

Perencanaan pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan tidak hanya memperkuat akuntabilitas publik, tetapi juga memungkinkan alokasi dana yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal¹². Penelitian oleh¹³ menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif menghasilkan program pendidikan yang

¹¹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.

¹² Kamaludin, "Optimalisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 1, no. 1 (2023): 6–13, <https://journal.pipuswina.com/index.php/jippsi/article/view/4>.

¹³ Syarifuddin et al. (2024)

lebih kontekstual dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam praktiknya, keterlibatan stakeholder seringkali bersifat simbolik atau sekadar administratif, belum menyentuh aspek substansial perencanaan pembiayaan¹⁴. Studi oleh¹⁵ mengungkapkan bahwa kolaborasi stakeholder berdampak positif terhadap efisiensi pembelanjaan dan persepsi masyarakat terhadap transparansi sekolah. Empat aspek penting yang menjadi fokus dalam pembahasan ini meliputi: manajemen pendidikan, transparansi dan efektivitas pembiayaan, peran komite sekolah, serta keterlibatan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan.

Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan yang efektif menuntut keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.¹⁶ menyebutkan bahwa partisipasi stakeholder dalam manajemen pendidikan memberikan dampak positif terhadap efektivitas organisasi sekolah. Keputusan yang lahir dari proses kolaboratif biasanya lebih adaptif terhadap kondisi lokal, realistis dalam implementasi, serta mencerminkan kebutuhan riil peserta didik.¹⁷ menegaskan bahwa keterlibatan stakeholder memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan, meningkatkan motivasi guru, dan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, manajemen partisipatif bukan hanya instrumen transparansi, tetapi juga sarana memperluas tanggung jawab sosial atas mutu pendidikan¹⁸.

Pada kenyataannya realisasi partisipasi yang ideal membutuhkan sejumlah prasyarat penting, seperti kepemimpinan sekolah yang terbuka, sistem komunikasi dua arah yang efektif, serta kultur organisasi yang menghargai musyawarah. Sayangnya, banyak sekolah masih terjebak dalam pendekatan top-down yang elitis, di mana keputusan dibuat oleh segelintir pihak tanpa melibatkan pemangku kepentingan lokal. Akibatnya, kebijakan

¹⁴ Herlina Ekawati, Titik Haryati, and Endang Wuryandini, "Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah," *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 278–89, <https://doi.org/10.51878/manajerial.v4i4.4179>.

¹⁵ Wardhani et al., (2022)

¹⁶ Jaenudin (2024)

¹⁷ Maryatini (2023)

¹⁸ Syahdenan, Akrim, and Muhammad Isman, "Efektivitas Pemberdayaan Stakeholder Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Muhammadiyah 30 Sihepeng Kecamatan Siabu," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi* 5, no. 4 (2024): 490–98, <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v5i4.21595>.

yang dihasilkan cenderung tidak responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi peserta didik, dan berisiko gagal dalam implementasi¹⁹. Kendala lainnya terletak pada rendahnya kapasitas stakeholder dalam memahami fungsi, hak, dan kewenangan mereka dalam manajemen sekolah. Penelitian²⁰ mengatakan bahwa minimnya pelatihan dan sosialisasi menyebabkan banyak aktor pendidikan merasa tidak kompeten atau enggan terlibat aktif.

Transparansi dan Efektivitas Pembiayaan

Transparansi dalam pembiayaan pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan efektivitas anggaran. Sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan berdampak langsung pada peningkatan layanan pembelajaran. Penelitian²¹ memperkuat argumen bahwa transparansi mendorong efisiensi penggunaan dana serta meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, penelitian oleh²² menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Sekolah yang membuka akses publik terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), melibatkan komite dalam audit internal, dan mempublikasikan laporan penggunaan dana secara berkala cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut berimplikasi langsung terhadap partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk sumbangan, kerja sama, maupun dukungan moral²³. Alokasi anggaran tidak boleh bersifat rutinitas administratif, melainkan responsif terhadap dinamika proses pembelajaran dan kebutuhan siswa.²⁴ mengungkapkan bahwa penganggaran strategis berbasis indikator mutu, seperti capaian belajar, rasio guru-siswa, dan kebutuhan sarana, menjadi pendekatan yang lebih tepat dalam memastikan efisiensi belanja pendidikan.

¹⁹ Muh Ibnu Sholeh et al., "Partisipasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Pesantren," *Edu Journal Innovation in Learning and Education* 1, no. 2 (2023): 121–41, <https://doi.org/10.55352/edu.v1i2.759>.

²⁰ oleh Syahdenan et al., (2024)

²¹ Norsiva & Suraijiah (2024)

²² Ratnawati et al., (2024)

²³ Suhesti Ningsih, Selvi Puspitasari, and Abdul Haris Romdhoni, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Sekolah Dan pengelolaan keuangan Dan bantuan Operasional Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Siswa," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29040/jap.v23i1.2978>.

²⁴ Hidayah et al., (2025)

Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi di lapangan. Banyak sekolah masih mengalami kesenjangan kapasitas dalam manajemen keuangan, mulai dari penyusunan RKAS, pengendalian internal, hingga pelaporan. Penelitian oleh ²⁵ mengatakan masyarakat sebagai aktor eksternal sering kali tidak memiliki literasi keuangan yang memadai untuk membaca dan menilai laporan keuangan sekolah. Hal ini memperlemah fungsi kontrol sosial terhadap anggaran pendidikan. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas dan transparansi pembiayaan pendidikan sangat diperlukan, bahkan transparansi bukan hanya soal kewajiban administratif, melainkan instrumen transformasi untuk memastikan setiap dana berkontribusi pada mutu pendidikan yang lebih baik.

Peran Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan representasi langsung dari masyarakat dalam tata kelola pendidikan. Sebagai lembaga nonstruktural yang berfungsi memberi pertimbangan, dukungan, dan pengawasan, komite memegang peranan kunci dalam mewujudkan pendidikan yang demokratis dan transparan. Dalam perencanaan pembiayaan, keterlibatan komite sangat penting untuk menjamin bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ²⁶. Penelitian oleh ²⁷ menunjukkan bahwa keaktifan komite sekolah dalam perencanaan dan evaluasi anggaran berkontribusi besar terhadap peningkatan akuntabilitas publik.

Komite yang dilibatkan dalam penyusunan RKAS dapat mengoreksi prioritas program, mengevaluasi efektivitas pembiayaan sebelumnya, serta memastikan bahwa dana digunakan secara optimal ²⁸. Lebih jauh, komite juga berfungsi sebagai kanal komunikasi antara sekolah dan orang tua, sehingga memperkuat legitimasi kebijakan sekolah ²⁹. Namun,

²⁵ Ningsih et al., (2022)

²⁶ Ekawati, Haryati, and Wuryandini, "Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah."

²⁷ Soro et al., (2024)

²⁸ Abeh et al., "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Negeri."

²⁹ Febiyana Angraini and Nurhasanah Nurhasanah, "Hubungan Sekolah, Orang Tua, Dan Masyarakat Di Sekolah Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Sekolah," *Tsaqofah* 4, no. 1 (2024): 855–71, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2615>.

komite sering kali tidak dilibatkan secara substansial dalam proses manajerial sekolah, atau hanya dijadikan formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan laporan³⁰.

Penelitian³¹ menyoroti belum adanya standar operasional yang baku dalam pelaksanaan fungsi komite sekolah. Akibatnya, peran dan fungsi komite sangat bergantung pada kebijakan kepala sekolah atau persepsi personal para anggotanya. Ketiadaan mekanisme evaluasi peran komite turut memperparah lemahnya posisi lembaga ini dalam sistem pendidikan nasional³². Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan sistematis yang mencakup pelatihan fungsional, peningkatan literasi kebijakan pendidikan, serta fasilitasi forum komunikasi antar komite sekolah³³.

Keterlibatan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan bukan semata-mata tentang kontribusi finansial, tetapi juga mencakup peran aktif dalam pengawasan, perencanaan, dan penjaminan mutu³⁴. Studi oleh³⁵ menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat mempercepat pencapaian target pendidikan, memperkuat kontrol sosial, dan mendorong keberlanjutan program. Sekolah yang mampu menjalin kemitraan strategis dengan masyarakat menunjukkan performa yang lebih baik dalam hal prestasi siswa dan pengelolaan sumber daya³⁶.

Sayangnya, masih terdapat kesenjangan antara potensi peran masyarakat dan realisasi partisipasinya³⁷. Beberapa masyarakat merasa tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk ikut campur dalam urusan sekolah. Sebaliknya, sebagian sekolah bersikap eksklusif terhadap keterlibatan eksternal karena dianggap mengganggu otonomi

³⁰ Norsiva and Surajjiah, "Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pendidikan Yang Transparan Dan Akuntabel Di Indonesia."

³¹ Abeh et al., (2025)

³² Ratnawati et al., "Efektivitas Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Smp Negeri Kabupaten Kendal."

³³ Arisanti and Sauri, "Analisis Kebijakan Program Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Partisipasi Orang Tua Dan Masyarakat."

³⁴ Sholeh et al., "Partisipasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Pesantren."

³⁵ Wardhani, Abdullah, and Miyono, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan."

³⁶ Maryatini, "Pengembangan Kurikulum Dan Pengembangan Kurikulum Dan Keterlibatan Stakeholder Terhadap Kualitas Manajemen Kurikulum Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Sekolah."

³⁷ Syahdenan, Akrim, and Isman, "Efektivitas Pemberdayaan Stakeholder Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Muhammadiyah 30 Sihepeng Kecamatan Siabu."

atau memperumit pengambilan keputusan³⁸. Selain itu, informasi terkait program sekolah, capaian siswa, dan penggunaan anggaran tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasa perlu untuk ikut terlibat³⁹.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan upaya bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kapasitas dan membuka ruang dialog yang lebih inklusif⁴⁰. Sekolah harus mengadopsi pendekatan transparan dalam pengelolaan program dan anggaran serta secara aktif mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi⁴¹. Pelatihan dan pendampingan bagi anggota masyarakat serta penguatan fungsi forum komunikasi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam berkontribusi⁴². Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya menjadi formalitas, melainkan menjadi kekuatan nyata yang mendorong kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Keterlibatan para pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, memiliki peran besar dalam merencanakan pembiayaan pendidikan. Ketika semua pihak dilibatkan sejak awal, perencanaan menjadi lebih tepat sasaran karena mempertimbangkan kebutuhan nyata di sekolah dan aspirasi masyarakat sekitar. Selain itu, keterlibatan ini mendorong transparansi penggunaan dana dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap mutu pendidikan. Namun, kenyataannya, belum semua sekolah mampu memfasilitasi partisipasi stakeholder secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem komunikasi, pelatihan bagi anggota komite sekolah, serta penciptaan forum-forum diskusi terbuka yang rutin dilakukan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kapasitas stakeholder, serta membangun budaya

³⁸ Jaenudin, "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah : Perspektif Pendidikan."

³⁹ Ningsih, Puspitasari, and Romdhoni, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Sekolah Dan pengelolaan keuangan Dan bantuan Operasional Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Siswa."

⁴⁰ Nasir et al., "Strategi Pemberdayaan Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Manajemen Pendidikan."

⁴¹ Anggraini and Nurhasanah, "Hubungan Sekolah, Orang Tua, Dan Masyarakat Di Sekolah Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Sekolah."

⁴² Hudodo, Ansar, and Fory Armin Naway, "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Puhuwato."

saling percaya, perencanaan pembiayaan pendidikan akan lebih efektif dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Keterlibatan stakeholder yang bermakna bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan sekolah, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeh, Yohanes Andy, Markus Wan, Samson Batang, Radithya Wibawa, Desi Natalia, Warman Warman, and Ahmad Fitriadi. "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Negeri." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 2445–54. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17975>.
- Amanati, Putri, Adinda Siti Mukhlisa, and Yayat Suharyat. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan." *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1828>.
- Anggraini, Febiyana, and Nurhasanah Nurhasanah. "Hubungan Sekolah, Orang Tua, Dan Masyarakat Di Sekolah Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Sekolah." *Tsaqofah* 4, no. 1 (2024): 855–71. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2615>.
- Arisanti, Risa, and Sofyan Sauri. "Analisis Kebijakan Program Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Partisipasi Orang Tua Dan Masyarakat." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 1 (2022): 103–24. <https://doi.org/10.47467/mk.v22i1.2061>.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.
- Ekawati, Herlina, Titik Haryati, and Endang Wuryandini. "Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah." *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 278–89. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v4i4.4179>.
- Hidayah, Emi, Erlin Sofiyanti, Inayah, and Ngurah Ayu Nyoman Muniati. "Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan Sebagai Upaya Strategis Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah." *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2025): 16–23. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4317>.
- Hudodo, Saiful, Ansar, and Fory Armin Naway. "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato." *Jurnal Normalita* 10, no. 3, September (2022): 181–95. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/JN/article/view/1803/1279>.
- Jaenudin. "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah : Perspektif Pendidikan." *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 939–44. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.937>.
- Kamaludin. "Optimalisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 1, no. 1 (2023): 6–13. <https://journal.pipuswina.com/index.php/jippsi/article/view/4>.

- Maryatini. “Pengembangan Kurikulum Dan Pengembangan Kurikulum Dan Keterlibatan Stakeholder Terhadap Kualitas Manajemen Kurikulum Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Sekolah.” *Cendekia* 17, no. 2 (2023): 223–40. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i2.868>.
- Nasir, Moh, Ady Alfian Mahmudinata, Miftah Ulya, and Fauzan Akmal Firdaus. “Strategi Pemberdayaan Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Manajemen Pendidikan.” *Journal Of International Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2023): 799–816. <https://doi.org/10.62504/mbznza39>.
- Ningsih, Suhesti, Selvi Puspitasari, and Abdul Haris Romdhoni. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Sekolah Dan pengelolaan keuangan Dan bantuan Operasional Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Siswa.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29040/jap.v23i1.2978>.
- Norsiva, and Suraijjah. “Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pendidikan Yang Transparan Dan Akuntabel Di Indonesia.” *Jurnal Riset Dan Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2024): 153–62. <https://doi.org/10.47498/skills.v3i2.4224>.
- Nurhayati, Arifuddin, Mulyanti Akib, La Ode Suriadi, M Natsir, and Aini Indrijawati. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Kolaka Timur.” *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* 8, no. 22 (2023): 38–51. <https://doi.org/10.33772/jpep.v8i1.254>.
- Ratnawati, Dewi, Ngatini, Fitriyati Dyah Permatasari, and Nurkolis. “Efektivitas Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Smp Negeri Kabupaten Kendal.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 2 (2024): 3114–27.
- Setiawan, Muhammad Ridwan, Adjat Sudrajat, and Ida Tedjawiani. “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah (Studi Deskriptif Tentang Peran Kepala Sekolah Dalam MBS Pada SMPN 3 Dan SMPN 4 Malangbong).” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2022): 1335–46. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.553>.
- Sholeh, Muh Ibnu, Muhammad Fathurro’uf, Sokip, Asrop Syafi’i, Nur ’Azah, and Dwi Andayani. “Partisipasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Pesantren.” *Edu Journal Innovation in Learning and Education* 1, no. 2 (2023): 121–41. <https://doi.org/10.55352/edu.v1i2.759>.
- Soro, Suharyanto H., Ahmad Rifandi, Yanti Sofayantina, and Liantanti. “Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru (Studi Kasus Penggunaan Anggaran Di SMP Negeri 36 Kota Bandung).” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2024): 2441–48. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1315>.
- Syahdenan, Akrim, and Muhammad Isman. “Efektivitas Pemberdayaan Stakeholder Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Muhammadiyah 30 Sihpeng Kecamatan Siabu.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi* 5, no. 4 (2024): 490–98. <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v5i4.21595>.
- Syarifuddin, S, R Rahmattullah, and A Akmaluddin. “Efektifitas Penggunaan Dana Bosp Pada Sekolah Dasar Negeri Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

- Berdasarkan Model Cipp Di Kabupaten Aceh Besar.” *Visipena Special Is* (2024): 53–74. <https://doi.org/10.46244/visipena.vi.2556>.
- Tuzahra, Wahyuni, and Maison. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 5 (2022): 2313–30. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i5.3667>.
- Wardhani, Anna Sri, Ghufon Abdullah, and Noor Miyono. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Prakarsa Paedagogia* 5, no. 2 (2022): 323–32. <https://doi.org/10.24176/jpp.v5i2.8003>.